

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Analisis Temuan Audit Kepatuhan Pengelolaan Bantuan Sosial APBN Pada Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2023 dilakukan untuk menguji efektivitas audit kepatuhan pengelolaan bantuan sosial baik dari sisi pengungkapan temuan audit sesuai dengan tujuan audit maupun kepatuhan Kementerian Sosial sebagai entitas pelaporan menindaklanjuti temuan audit yang dimaksud.
- b. Kesesuaian hasil audit belanja bantuan sosial APBN Kementerian Sosial periode tahun 2020 – 2023 dengan tujuan audit menunjukkan pelaksanaan audit kepatuhan BPK atas pengelolaan bansos sudah memenuhi tujuan audit. Temuan audit kepatuhan pengelolaan belanja bansos sesuai dengan tujuan audit meliputi hasil audit terkait kriteria ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, kriteria ketepatan jumlah penerimaan bantuan sosial, kriteria ketepatan waktu penyaluran dan penerimaan bantuan sosial, kriteria ketepatan penganggaran atau penggunaan anggaran untuk bantuan sosial, kriteria ketepatan ketentuan untuk penyaluran bantuan sosial.
- b. Efektivitas audit kepatuhan belanja bantuan sosial APBN Kementerian Sosial tahun 2020 – 2023 dari aspek tindak lanjut audit menunjukkan kepatuhan kemensos menindaklanjuti rekomendasi terkait kepatuhan. Perbandingan jumlah rekomendasi dengan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi menunjukkan audit atas pengelolaan bansos tahun 2019 terdapat 20 rekomendasi dan ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi, pengelolaan bansos tahun 2020 terdapat 37 rekomendasi dan ditindaklanjuti sebanyak 21 rekomendasi, pengelolaan bansos

tahun 2021 terdapat 38 rekomendasi dan ditindaklanjuti sebanyak 27 rekomendasi, pengelolaan bansos tahun 2022 terdapat 32 rekomendasi dan ditindaklanjuti sebanyak 21 rekomendasi.

- c. Efektivitas hasil audit belanja bantuan sosial APBN Kementerian Sosial tahun 2020 – 2023 ditandai dengan temuan audit berulang yang menunjukkan pengelolaan bansos tahun 2020 dari 10 temuan audit ditemukan sebanyak 2 temuan yang berulang dari tahun 2019, pengelolaan bansos tahun 2021 dari 13 temuan audit ditemukan sebanyak 3 temuan yang berulang dari tahun 2020, pengelolaan bansos tahun 2022 dari 9 temuan audit ditemukan sebanyak 3 temuan yang berulang dari tahun 2021, pengelolaan bansos tahun 2023, dari 11 temuan audit ditemukan sebanyak 7 temuan yang berulang dari tahun 2022.

5.2 Saran

1. Bagi BPK
 - a. untuk efektivitas audit kepatuhan pengelolaan bantuan sosial APBN Kementerian Sosial perlu mengingatkan kepatuhan Kementerian Sosial menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.
 - b. Menggunakan kepatuhan tindak lanjut rekomendasi audit kepatuhan pengelolaan bantuan sosial APBN Kementerian Sosial sebagai pertimbangan pemberian opini audit.
2. Bagi Kementerian Sosial
 - a. Sebagai masukan kepatuhan entitas dalam menindak lanjut sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara.

- b. Sebagai masukan untuk penyempurnaan dan perbaikan sistim pengendalian internal untuk mencegah permasalahan yang sama menjadi temuan berulang.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi akuntabilitas pengelolaan belanja bantuan sosial oleh Kementerian Sosial semaksimal mungkin diterima masyarakat sejalan ketetapan perundang-undangan yang ada. Studi ini dapat bermanfaat untuk memastikan peran audit kepatuhan memberikan informasi faktual terkait kepatuhan belanja Kementerian Sosial dalam pengelolaan bantuan sosial.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan studi ini Keterbatasan dalam studi ini mencakup beberapa hal. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sehingga ruang lingkupnya hanya terbatas pada Kementerian Sosial, yang membuat hasilnya tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi kepada Kementerian/Lembaga lainnya yang mengelola bansos entitas pemerintah daerah. Kedua, penelitian ini mengandalkan data sekunder, sehingga ada keterbatasan dalam memperoleh informasi yang lebih mendalam. Ketiga, terdapat potensi subjektivitas dan bias interpretasi pada analisis data kualitatif, meskipun hal ini telah diminimalkan dengan merujuk pada standar dan literatur yang relevan. Maka, untuk studi selanjutnya disarankan menjalankan studi serupa pada Kementerian lainnya, antara lain Kementerian Pendidikan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM serta pada Pemerintah Daerah.

5.4 Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis ialah hasil temuan studi pada teori yang dipakai, dimana pada studi ini digunakan teori keagenan dan teori kepatuhan. Keterbatasan kedua teori tersebut adalah tidak menguji dinamika politik dalam pengelolaan bantuan sosial karena teori keagenan lebih menitik beratkan pada hubungan antara principal dengan agen. Asimetri informasi diantara keduanya dapat dijumpai dengan peran auditor melakukan audit terhadap pertanggungjawaban agen. Sedangkan teori kepatuhan lebih menitik beratkan pada aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara normatif sedangkan penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik membutuhkan pendekatan hukum dan etika sehingga untuk meneliti penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik diperlukan grand teori lain sebagai pendukung selain teori keagenan dan teori kepatuhan.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini mempunyai implikasi praktis terhadap penerapan audit kepatuhan pengelolaan belanja bantuan sosial pada lingkup pemerintah daerah. Kemungkinan penyalahgunaan belanja bantuan sosial dapat dilakukan untuk kepentingan politik oleh kepala daerah dalam rangka memenangkan konstetasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan antara kepala daerah sebagai pemimpin politik tidak memiliki jarak dengan penerima bansos sebagai warga masyarakat. Berbeda halnya dengan pengelolaan Kementerian Sosial, dimana Menteri Sosial selaku pejabat politik memiliki jarak dengan penerima bansos, sehingga penyalahgunaan bansos pada belanja bantuan sosial APBN relatif terbatas. Selain itu sistem penyaluran belanja bansos APBN dengan cara non tunai dan tranfer uang menghilangkan simbol politik dari sosok

Menteri Sosial sebagai politisi. Untuk itu BPK lebih memprioritaskan kebijakan audit kepatuhan untuk pemerintah daerah terhadap pengelolaan belanja bansos APBD sejalan dengan peran auditor menjembatani asimetri informasi.

